

RELEVANSI TEO-DEMOKRASI ABU A'LA AL-MAUDUDI TERHADAP SISTEM DEMOKRASI DI INDONESIA

Salim Richardo Harahap, Drs. Suswanta, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Richardosalim1994@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan relevansi antara Teo-Demokrasi Abu A'la Al-Maududi terhadap sistem demokrasi Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (Library Research) dengan menggunakan sumber data : Primer (buku-buku pokok) dan Sekunder (buku-buku tambahan). Di dalam penelitian ini membahas mengenai relevansi beberapa ciri-ciri demokrasi yang di Indonesia dengan konsep-konsep dari Teo-Demokrasi Abu A'la Al-Maududi.

Kata Kunci: Relevansi, Teo-Demokrasi, Demokrasi

PENDAHULUAN

Dalam pemikiran politik Islam, hubungan politik dan agama (Islam) hingga kini menjadi bahan perdebatan (Abu R, 2004: 1). Dalam hal perdebatan wacana tentang demokrasi, intelektual Muslim terbagi ke dalam beberapa kelompok (Aat, 2015:403). *Pertama*, mayoritas masyarakat Islam tidak memisahkan antara Islam dan Demokrasi. Kelompok ini menyatakan bahwa Islam dan Demokrasi

merupakan hal yang saling menguntungkan dan saling mengisi. *Kedua*, sebagian masyarakat Islam menegaskan bahwa ada hubungan yang canggung antara Islam dan demokrasi. Menurut kelompok ini Islam dan Demokrasi merupakan hal yang bertentangan. *Ketiga*, sebagian masyarakat Islam lainnya menerima adanya hubungan antara Islam dan demokrasi, tetapi dengan memberikan catatan kritis. Mereka tidak sepenuhnya menerima dan tidak sepenuhnya menolak hubungan antara Islam dan Demokrasi.

Sebagian cendekiawan muslim mengarahkan pemikirannya ke sekularisme dalam arti adanya pemisahan antar agama dan politik (Aat H, 2015: 20). Mereka memandang Islam sekedar keyakinan hubungan antara Tuhan dengan Umatnya, hanya sekedar hubungan mistis. Mereka memandang bahwa agama adalah persoalan individu dengan Tuhannya bukan permasalahan duniawi. Ketika agama dijadikan sebagai aturan politik maka akan melahirkan konflik internal di negara tersebut. Agar konflik tersebut tidak terjadi maka agama dibuang jauh-jauh dari urusan politik maupun urusan publik.

Imam Ghazali (2001: 118) yang merupakan salah satu pemikir politik Islam yang menyatakan bahwa Islam memandang politik merupakan suatu hal yang sangat mulia, seperti amal-amal ibadah lainnya. Maka faktor niat dan ketentuan-ketentuan operasional di dalam perpolitikan sangat menentukan keabsahan yang berkaitan dengan hikmah kebijakan mengenai masalah-masalah dunia dan urusan pemerintahan. Ibnu Qoyyim (Abdul, 2004: 23) juga menyatakan bahwa “sesungguhnya politik yang adil tidak akan bertentangan dengan syariat dan bahkan sesuai dengan ajarannya, dan menjadi bagian dari syariat. Dalam hal ini

kami menyebutnya dengan siyasah karena mengikuti anda. Padahal sebenarnya ia adalah keadilan Allah dan Rosul-Nya”.

Hasan Al Banna (Ruslan, 2000:72) juga pernah mengutarakan konsep tentang politik dimana ia menyatakan bahwa hubungan antara Islam dengan Politik dan Sikap seorang muslim dalam menanggapi. Ia berpendapat bahwa:

“Politik merupakan hal yang memikirkan tentang persoalan-persoalan internal maupun eksternal umat. ia memiliki dua sisi: internal dan eksternal. Sisi internal yaitu, mengurus persoalan di pemerintahan, menjelaskan fungsi-fungsinya, membagi kewajiban dan hak-haknya, melakukan pengawasan terhadap para penguasa untuk kemudia dipatuhi jika mereka melakukan kesalahan. Sedangkan, sisi eksternal adalah memelihara kemerdekaan bangsa, kebebasan bangsa, mengantarkan tujuan yang akan memposisikan kedudukannya di tengah-tengah bangsa lain, serta membebaskan penindasan dan campur tangan dari pihak lain dalam urusan-urusannya”.

Sedangkan, sebagian cendekiawan muslim yang lain mempercayai bahwa Islam adalah agama yang yang sempurna dan lengkap dengan pengaturan bagi segala aspek kehidupan politik (Zuhriani, 2014:34). Salah satu cendekiawan muslim yang sepakat dengan pernyataan ini adalah Sayyid Abu A’la Al-Maududi. Al-Maududi adalah figur penting dalam kebangkitan Islam (Ali, 1995:101). Interpretasi Islamnya menjadi pondasi pemikiran kebangkitan Islam Kontemporer. Di Tinjau dari kacamata teori politik modern atau teori politik sekular, teori politik Islam seperti yang dikembangkan oleh Maududi kelihatan unik, bahkan mungkin “ganjil”. Keunikan atau katakanlah keganjilan teori politik Maududi terletak pada konsep dasar yang menegaskan bahwa kedaulatan (*Souveniritas*) ada ditangan Tuhan, ‘bukan’ di tangan manusia. Jadi berbeda dengan teori demokrasi pada umumnya yang menyatakan kedaulatan berada ditangan rakyat.

Dalam kenyataannya, kata-kata “kedaulatan rakyat” seringkali menjadi kata-kata kosong karena partisipasi rakyat dalam kebanyakan negara demokrasi hanyalah dilakukan empat atau lima tahun sekali dalam bentuk pemilu, sedangkan kendali pemerintahan sesungguhnya berada di tangan sekelompok kecil penguasa yang menentukan seluruh kebijaksanaan dasar negara. Sekelompok penguasa itu bertindak atas nama rakyat, sekalipun sebagian pemikiran dan tenaga yang mereka kerahkan bukan untuk rakyat, tetapi hanyalah untuk melestarikan kekuasaan yang mereka pegang dan untuk mengamankan *vested interests* mereka sendiri (Al-Maududi, 1975 :20).

Pada saat ini, demokrasi bukan lagi sekedar wacana intelektual, melainkan juga impian bahkan keinginan berbagai negara, khususnya negara-negara berkembang seperti Indonesia. Indonesia merupakan negara yang mayoritas berpenduduk Muslim terbesar di dunia (Yudi, 2011:88) dan merupakan salah satu negara yang menerapkan sistem demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah negara India dan Amerika Serikat (Eddy, 2007:2). Meskipun sering disebut sebagai negara demokrasi, namun dalam konsep penerapan demokrasi Indonesia masih dinilai masih belum dapat dikatakan berjalan sesuai sebagaimana yang diinginkan oleh masyarakat.

Itulah sebabnya mengapa Maududi tidak bergairah untuk tidak menyetujui demokrasi seperti yang dipraktekkan oleh kebanyakan negara modern, yang ternyata sistem politik yang dianggap paling modern itu gagal menciptakan keadilan sosio-ekonomi, sosio-politik dan juga keadilan hukum.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan dengan Latar Belakang diatas dapat disimpulkan bahwa rumusan permasalahan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

“Bagaimana Relevansi Teo-Demokrasi Abu A’la Al-Maududi terhadap Sistem Demokrasi di Indonesia?”

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian ini bersifat deksriptif dan mencoba membuka sebuah tema diskusi tentang wacana relevansi demokrasi Islam dan demokrasi Barat yang diterapkan di Indonesia. Dalam penelitian ini dicoba untuk merelevansikan dari salah satu pemikiran cendekiawan muslim tentang Teo-Demokrasi nya dengan sistem demokrasi di Indonesia yang dimana terdapat keterkaitan dari beberapa konsep yang pemerintahan Islam Al-Maududi dengan konsep demokrasi di Indonesia.

Buku yang cukup untuk mengkaji konsep pemikiran dari Al Maududi adalah:

1. Hukum dan Konstitusi: Sistem Politik Islam (terj.) karya dari Al-Maududi.
2. Khilafah dan Kerajaan (terj.) karya dari Al-Maududi.

Ketertarikan peneliti membahas mengenai judul skripsi ini dikarenakan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, khususnya di jurusan Ilmu Pemerintahan belum ada yang membahas dan mengangkat topik penelitian ini. Peneliti belum menemukan judul skripsi yang membahas dari pemikiran Al Maududi di UMY. Oleh karena itu, studi tentang komparasi ini dapat memperkaya topik-topik

diskusi dalam kuliah ilmu politik pada umumnya dan filsafah politik Islam pada khususnya.

METODE

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian *Library Research*. Menurut Sutrisno Hadi di dalam jurnal yang ditulis oleh Nursapia Harahap dengan judul “Penelitian Kepustakaan” menyebutkan bahwa penelitian kepustakaan membutuhkan data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian tersebut yang berasal dari perpustakaan baik berupa buku, ensiklopedia, kamus, jurnal, dokumen, majalah dan lain sebagainya.

Berdasarkan dari jenis masalah yang diteliti, teknik dan alat yang digunakan dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan jenis penelitian kepustakaan dan dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Karena menurut dari definisinya penelitian kualitatif, yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2008:9).

PEMBAHASAN

a. Analisis Pemikiran Teo-Demokrasi Al-Maududi

Teo-demokrasi adalah sistem pemerintahan demokrasi yang Ilahi, karena dibawah kuasa Allah kaum Muslim diberikan kedaulatan rakyat dibawah

pengawasan Tuhan dan juga dalam sistem ini di perlukan musyawarah untuk kesepakatan bersama yang berdasarkan atas Al Quran dan Hadits (Al Maududi, 1975:160). Dengan Teo-Demokrasi Maududi menginginkan suatu konsep antitesis atas demokrasi Barat sekuler yang menurutnya didasari pada kedaulatan rakyat, karena itu bertentangan dengan Islam. Negara Islam itu mengacu pada dua prinsip, yaitu: kedaulatan Tuhan dan Perwakilan manusia (M Din, 2001: 142).

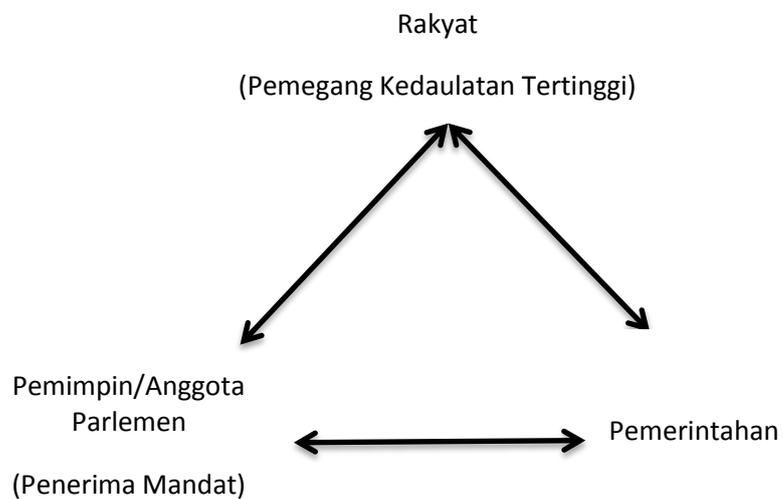
Di sini menurut pendapat Al Maududi mengenai Theo-Demokrasi nya ialah hanya Allah yang berhak untuk memiliki hak prerogatif dalam mengatur dan sebagai penguasa alam ini, termasuk juga hukum-hukum-Nya dan aturan-aturan-Nya dan khilafah yang memimpin di Negara muslim pun harus berada di bawah pengawasan dan kedaulatan Tuhan. Maka apa yang umat muslim kerjakan di muka bumi ini harus sesuai dengan kedaulatan dan hukum-hukum dari Tuhan. Didalam buku hukum dan konstitusi (terj.) karya dari Al Maududi dijelaskan bahwa setiap umat muslim yang dipilih oleh seluruh umat Muslim memiliki hak untuk menafsirkan hukum dan umat Muslim berhak menegur khalifah (pemimpin) yang dipilih oleh mereka apabila menurut mereka kepemimpinannya menyimpang atau melenceng dari syariah Islam dan ummat muslim diberikan hak untuk bertindak sesuai dengan syariah dan aturan Allah untuk mengkritik pemimpin mereka.

Terdapat beberapa perbedaan antara demokrasi Barat dengan Teo-Demokrasi yang ditawarkan Maududi. Dari segi pengertian jelas terdapat perbedaan yaitu dimana kedaulatan pada Demokrasi Barat kedaulatannya diberikan kepada rakyat sepenuhnya, sedangkan pemerintahannya yang

dipilih harus dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sedangkan, menurut Teo-Demokrasi Maududi kedaulatan berada di tangan Allah SWT dan rakyat sebagai pelaksananya. Penulis menjabarkan bentuk dari Perbedaan Teo-Demokrasi dengan Demokrasi Barat.

Gambar 3.1

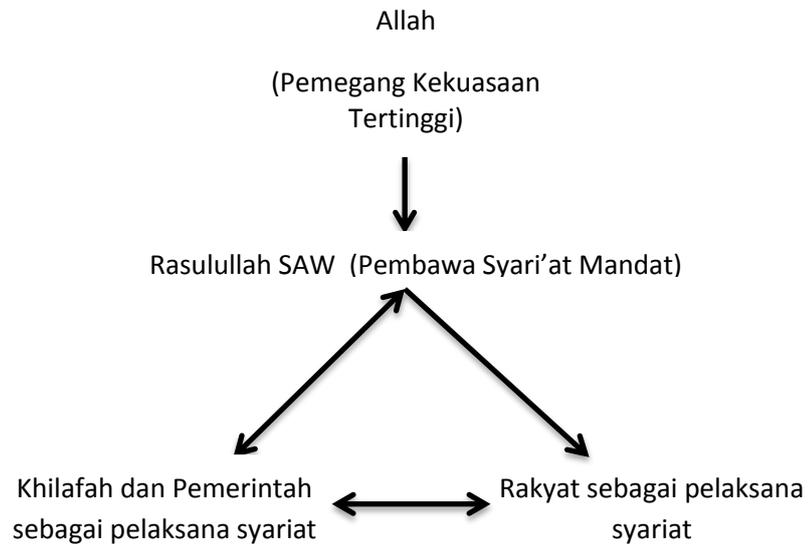
Bagan Demokrasi Barat



Sumber: Diolah oleh Penulis 2018

Gambar 3.2

Bagan Teo-Demokrasi



Sumber: diolah oleh Penulis 2018

Bagan ini dibuat penulis untuk menjelaskan proses berjalannya demokrasi baik demokrasi Barat maupun Teo-Demokrasi. Demokrasi Barat memberikan mandat kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, kemudian dilanjutkan kepada pemimpin atau anggota parlemen untuk melaksanakan keinginan rakyat untuk menciptakan rakyat yang sejahtera. Rakyat disini adalah pemegang kekuasaan tertinggi. Sehingga pemerintah mempunyai hak untuk mengikuti keinginan rakyat dan mentaatinya, serta

rakyat mempunyai hak untuk mengkritik pemerintah apabila tidak sesuai dengan keinginan rakyat. Maka dari itu penulis memberikan tanda panah yang 2 arah karena semua yang diberikan oleh rakyat dilaksanakan oleh pemerintah dan untuk rakyat.

b. Relevansi Pemikiran Sayyid Abu A'la Al-Maududi terhadap sistem demokrasi di Indonesia.

Relevansinya dengan demokrasi yang ada di Indonesia, penerapan Teo-Demokrasi itu tergantung bagaimana masyarakat melihat Indonesia itu sendiri. Indonesia merupakan negara yang merdeka bukan hanya karena peran umat Islam di antaranya akan tetapi adanya peran dari umat beragama lainnya. Maka dari itu, apabila kita menerapkan hukum Islam di Indonesia akan menimbulkan konflik di Indonesia dan akan menimbulkan perpecahan di Indonesia. Secara substantif ada banyak relevansi antara pemikiran Teo-Demokrasi Al-Maududi Terhadap Sistem Demokrasi di Indonesia, diantaranya seperti:

1. Teo-Demokrasi Al-Maududi menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan Tuhan. Sedangkan, Demokrasi di Indonesia menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat. Akan tetapi, seperti yang telah penulis uraikan diatas terdapat keterkaitan antara kedaulatan dari Al Maududi dengan yang ada di Indonesia. Yang menjadi salah satu pembandingan penulis adalah seperti yang tertera kepada UUD 1945 sebagai konstitusi negara dan yang tertera di dalam Pancasila sebagai dasar ideologi bangsa Indonesia di dalam sila pertama dijelaskan

“Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hal ini menimbulkan pertanyaan yang mendalam di dalam benak bangsa Indonesia. Darimana awal muncul terbentuknya Ke-Tuhanan Yang Maha Esa? Akan tetapi disini penulis mendapatkan jawaban berdasarkan pertanyaan tersebut, yaitu:

”ada hubungan antara sila Ketuhanan Yang Maha Esa Dalam Pancasila dengan ajaran Tauhid dalam teologi Islam. Jelaslah pula bahwa sila pertama Pancasila yang merupakan prima causa atau sebab pertama itu, sejalan dengan beberapa ajaran tauhid Islam, dalam hal ini ajaran tentang tauhidus-shifat dan tauhidul-af’al dalam pengertian bahwa Tuhan itu Esa dalam sifatnya dan perbuatannya. Ajaran ini juga diterima oleh Agama-agama lain di Indonesia”. (Anzhari,2001:21).

Dari penjelasan dan yang telah diuraikan oleh penulis diatas dapat dilihat bahwa di Indonesia menurut yang tertera pada UUD 1945, kedaulatan rakyat bukan lah satu-satunya yang digunakan di Indonesia. Akan tetapi, terdapat juga kedaulatan Tuhan dan Kedaulatan Hukum di dalamnya. Hal ini menurut penulis relevan dengan tujuan dan maksud dari Teo-Demokrasi di Indonesia.

2. Dari konsep Hak Asasi. Indonesia dan Maududi sama-sama setuju dengan adanya hak asasi manusia. Berikut adalah point-point penting yang relevan dengan hak asasi menurut Maududi:

- a. Hak untuk Hidup .
- b. Hak untuk menolak kejahatan.
- c. Hak-Hak untuk mempertahankan kepemilikan.
- d. Hak Kebebasan Beragama.
- e. Hak-Hak dari tidak mendapatkan diskriminasi.

3. Dari Konsep Permusyawaratan. Terdapat beberapa hal yang menurut penulis relevan dengan Indonesia, yaitu: pemerintahan Indonesia sama halnya dengan pemikiran Al Maududi yaitu sama-sama setuju dengan adanya Permusyawaratan. Menurutnya Al Maududirx Pemilihan Uliil Amri ini haruslah bertanggung jawab, shaleh, tidak zalim dan memiliki intelektual yang baik (Meitokrasi). Hal ini yang diterapkan di Indonesia akan tetapi menurut penulis perbedaannya hanya terletak pada persyaratannya saja, di Indonesia lebih mementingkan hanya kepada orang yang memiliki modal, dan dengan sedikit intelektual serta pemahamannya tentang agama.
4. Terdapat kesamaan dari pemikiran Al Maududi yang membagi kekuasaan ada tiga bagian, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pembagian ini berguna agar tidak terjadinya ketimpangan dari sistem pemerintahan di Indonesia. Disini keinginan dari Maududi dan juga pemerintah Indonesia adalah menciptakan pemerintahan yang check and balance, yaitu dimana pemerintahannya saling bekerja sama untuk menciptakan negara yang sejahtera.

PENUTUP

Dari Uraian yang telah penulis jelaskan diatas, penulis menarik tiga point penting yang menjadi inti dari pembahasan dari Relevansi Teo-demokrasi Abu A'la Al-Maududi terhadap sistem demokrasi di Indonesia serta menjawab rumusan masalah di awal.

1. Pemikiran Abu A'la Al-Maududi tentang Teo-Demokrasi berpedoman terhadap Al Quran dan Hadits. Al Maududi menginginkan suatu konsep antitesis atas demokrasi Barat sekuler yang menurutnya didasari pada kedaulatan rakyat, karena itu bertentangan dengan Islam. Yang dimaksud dengan Teo-Demokrasi adalah sistem pemerintahan demokrasi yang Ilahi, karena dibawah kuasa Allah kaum Muslim diberikan kedaulatan rakyat dibawah pengawasan Tuhan dan juga dalam sistem ini diperlukan musyawarah untuk kesepakatan bersama yang berdasarkan atas Al Quran dan Hadist.

Dari beberapa konsep yang diajukan oleh Al Maududi hanya 4 saja yang menurut penulis relevan dengan sistem demokrasi di Indonesia. Dari beberapa konsep diatas ada konsep yang tidak dapat diterapkan di Indonesia. Jika konsep pemerintahan Islam Al Maududi di terapkan di Indonesia, hal itu dapat memicu konflik dan perpecahan di Indonesia apabila tetap dipaksakan untuk diterapkan di Indonesia. Indonesia Merdeka bukan hanya karena adanya umat Islam yang berkorban. Akan tetapi, ada juga peran dari umat beragama lainnya yang ikut berjuang untuk memerdekakan Indonesia.

2. Pemikiran Abu A'la Al Maududi tentang Teo-Demokrasi sangat relevan dengan sistem demokrasi di Indonesia. Penulis berpendapat terdapat beberapa point dari konsep Teo-Demokrasinya yang relevan, yaitu:

- 1) Berdasarkan dari UUD Dasar sebagai konstitusi negara dan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia terdapat relevansi antara Teori Kedaulatan Al Maududi dengan Kedaulatan yang ada di Indonesia. Jika kita gali lebih dalam dapat kita pahami bahwa di dalam UUD dan

Pancasila di Indonesia bukan hanya menggunakan kedaulatan rakyat akan tetapi juga terdapat kedaulatan Tuhan dan Kedaulatan Hukum di dalamnya.

- 2) Al Maududi sama-sama setuju dengan adanya Hak Asasi Manusia (HAM), dan didalamnya juga Al Maududi menyetujui dengan adanya kebebasan untuk rakyat dalam berpendapat dan mengkritik.
- 3) Trias politica juga terdapat kesamaan dengan yang diterapkan di Indonesia, akan tetapi perbedaannya hanya terletak pada fungsi dari lembaga tersebut.
- 4) Al Maududi setuju dengan pembuatan Permusyawaratan yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan tentang perundang-undangan dan perkara-perkara kaum Muslimin seperti penafsiran hukum-hukum yang eksplisit agar tidak terjadi penyimpangan dalam persepsi bagi kaum muslimin.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Al Ghazali, A.H. 2001. *Meretas Jalan Kebangkitan Islam Peta Pemikiran Hasan Al Banna*. Surakarta: Media Insani Press.

Al-Maududi, A.A. 1975. *Hukum dan Konstitusi:: Sistem Politik Islam*. Bandung: Mizan.

Anzhari, A.F. 2000. *Sistem Pengambilan Keputusan Demokratis menurut Konstitusi*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.

Junadi, Y. 2011. *Agama dan Negara: Redefinisi Diskursus Konstitusionalisme di Indonesia*. Jakarta: IRM Press.

- Mu'iz, R. 2000. *Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin*. Surakarta: Era Intermedia.
- Purnama, E. 2007. *Negara Kedaulatan Rakyat Analisis Terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia dan Perbandingannya dengan Negara lain*. Bandung. Nusamedia.
- Rahnem, A. 1995. *Para Perintis Zaman Baru Islam*. Bandung: Mizan Anggota IKAPI.
- Ridha, A. 2004. *Islam dan Politik mungkinkah bersatu*. Bandung: Syaamil.
- Rozak, A. 2004. *Pendidikan Kerwarganegaraan: Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Syamsuddin, M.D. 2001. *Islam dan Politik Era Orde Baru*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

JURNAL

- Harahap, N. 2014. *Penelitian Kepustakaan*. Volume08 Nomor 01.
- Hidayat, A. 2015. *Syura dan Demokrasi Dalam Perspektif Al-Quran*. Volume 9. Nomor 2.
- Zuhraeni. 2014. *Islam: Negara, Demokrasi, Hukum dan Politik*. Volume 14, Nomor 1.